



▶ ANGGARAN DAERAH

# Jatah Perdin Dikurangi Separuh

**BANTUL**—Sekretaris Daerah Bantul Agus Budiraharja menerbitkan surat edaran efisiensi anggaran daerah dengan satu hal di antaranya berupa pengurangan kegiatan perjalanan dinas (perdin) sebesar 50%.

Jumali

jumali@harianjogja.com

Ada pula pengurangan kegiatan seremonial, forum grup diskusi, pelatihan, sosialisasi, makan-minum dan pembelian alat tulis kantor (ATK). Semua itu tertuang dalam SE Sekda soal kegiatan yang diperbolehkan untuk digelar masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).

"OPD yang punya kegiatan

▶ Hasilnya akan difinalkan Bupati Bantul Abdul Halim Muslih agar Perbup selesai secepatnya.

▶ Efisiensi APBD 2025 juga akan digunakan untuk menutup dipotongnya Dana Alokasi Khusus (DAK).

sesuai dengan SE Mendagri tetap bisa menjalankan kegiatan tapi dengan batasan maksimal 50 persen," ungkapnya, Kamis (27/2). SE dikeluarkan agar OPD tetap bisa beraktivitas sesuai dengan SE Mendagri No.900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah.

Selain itu, keberadaan SE Sekda Bantul dinilai penting sembari menunggu terbitnya Peraturan Bupati (Perbup)

tentang Perubahan Kedua atas Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan SE Mendagri.

Agus mengungkapkan saat ini dirinya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah melakukan perhitungan terkait dengan persentase efisiensi sesuai dengan SE Mendagri. Selain itu, TAPD juga tengah menghitung prioritas kegiatan yang hendak dilakukan imbas dari adanya SE Mendagri.

Setelah itu, hasilnya akan difinalkan oleh Bupati Bantul Abdul Halim Muslih agar Perbup Perubahan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang disesuaikan dengan SE Mendagri selesai secepatnya.

"Semakin cepat selesai dan tertantatanganinya Perbup perubahan [Perbup tentang

Perubahan Kedua atas Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025] segera lebih baik. Teman-teman OPD tentu tidak ada gangguan dan masyarakat juga segera mendapatkan manfaat dari APBD," ucap Agus.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul Trisna Manurung mengatakan sampai saat ini instansinya tinggal menunggu terbitnya Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.

Dalam Perbup tersebut akan ada kejelasan alokasi efisiensi yang diarahkan kebidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga makan dan minuman, penyediaan pangan, dan prioritas lainnya yang

berorientasi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, efisiensi APBD 2025 juga akan digunakan untuk menutup dipotongnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) infrastruktur dari Dana Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp 21,7 miliar.

Pelaksana tugas Kepala DPUPKP Bantul Jimmy Arlan Manumpak Simbolon memaparkan saat ini sejumlah kegiatan proses awal lelang untuk tiga titik perbaikan jalan dengan APBD Bantul sudah mulai dilakukan meski masih dalam tahap surat penunjukan barang/jasa.

Sebanyak tiga titik tersebut adalah Jalan Sindet-Plencing senilai Rp1,5 miliar; Jalan Sumberagung-Potrobayan senilai Rp497,7 juta dan Jalan Sindon-Bibis senilai Rp426,4 juta.